

Model Sosial Teknologi Informasi untuk Menciptakan Budaya Transparan sebagai Kunci Perubahan Terhadap Masyarakat : Conceptual Framework

Diah Triesia¹, Darius Antoni², Muhamad Akbar³
^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Bina Darma
Jalan Ahmad Yani No.3, Plaju, Palembang
diah_triesia@yahoo.co.id, darius.antoni@binadarma.ac.id

Abstrak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat serta berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial teknologi dan sosial media. Sosial teknologi informasi dipergunakan semaksimal mungkin oleh beberapa negara berkembang untuk memberikan informasi serta mempromosikan keterbukaan informasi dalam pemerintahan, serta meningkatkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu konsep teknologi informasi yang berguna membahas dampak potensial dari penggunaan sosial TI di transparansi dan budaya pemerintahan melalui sosial teknologi dan sosial media. Hasil penelitian menunjukkan, untuk menciptakan pemerintahan transparan diperlukan inisiatif dan pemahaman budaya setiap pemerintahan sebagai kunci perubahan.

Kata-kata Kunci: TI, Budaya transparansi, Perubahan masyarakat.

1 Pendahuluan

Teknologi informasi (TI) sudah digunakan sebagai alat perubahan di organisasi dan instansi pemerintahan. Sosial teknologi adalah salah satu jenis TI yang saat ini digunakan sebagai kunci perubahan dalam transparansi dan keterbukaan informasi di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Pemerintahan kota Palembang adalah salah satu contoh pemerintahan yang menggunakan sosial teknologi seperti facebook, tweeter dan instagram untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, penggunaan sosial teknologi sangat membutuhkan *feedback* masyarakat agar informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti secara tepat dan benar.

Budaya salah satu kendala dalam penyampaian keterbukaan informasi melalui sosial teknologi dan sosial media karena setiap lingkungan pemerintahan memiliki budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempersulit menerima dan mengerti informasi yang telah diterima.

Pada *website* pemerintah kota Palembang hanya menyediakan informasi mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh wali kota Palembang, yaitu melaksanakan kegiatan gotong-royong dalam membersihkan setiap lingkungan yang ada di kota Palembang. Dalam *website* ini juga terdapat layanan untuk mengurus perizinan dan jasa

publik dan informasi hiburan disana merupakan jelaja wisata di kota Palembang. Tidak hanya *website*, pemerintah kota Palembang juga berinteraksi dengan masyarakat melalui sosial media seperti facebook, twitter dan instgram. Maka itu interaksi bapak wali kota kepada masyarakat bisa diterima secara langsung dan bisa ditindak lanjuti secara cepat. Transparansi yang dimaksud disini adalah menyediakan peraturan pemerintah dan hak-hak masyarakat, memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah, mempromosikan pemantauan tindakan pemerintah dan pengeluaran, menyebarluaskan informasi kinerja pemerintahan. Dengan adanya informasi tersebut dan diterapkan kedalam sosial teknologi dan sosial media untuk diberikan kepada msyarakat kota Palembang sesua dengan budaya yang ada maka tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan akan tercapai demi terciptanya kunciperubahan yang besar. Dengan adanya pemerintahan yang transparan maka kunci terbesar dalam pemerintahan adalah mempersempit kemungkinan pegawai pemerintahan untuk korupsi dan kinerja pemerintah semakin berkembang untuk membangun pemerintahan kota Palembang.

2 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur. Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konseptualisasi lebih dalam dan lebih jelas tentang penerapan transparansi pada *e-government* kota Palembang. Sebuah metode *literature* pustaka sangat cocok digunakan untuk menciptakan dasar yang kuat untuk memajukan pengetahuan dan teori pembangunan, sebuah tinjauan *literature* sistematis melibatkan tiga kegiatan berurutan dari *input*, proses dan *output* [1].

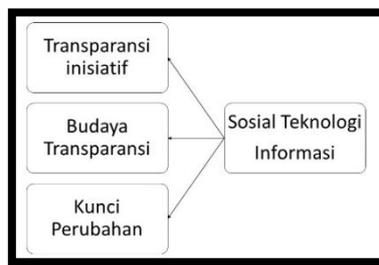
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Penelitian	Kerangka untuk Mengukur Interaksi Sosial Media Sosial kepada Masyarakat		
		Transparansi	Budaya	Kunci Perubahan
1	Hidayat [2]	✓		
2	Welta [3]	✓		
3	Unsworth [4]	✓	✓	✓
4	Mergel [5]	✓	✓	✓
5	Kurniasih [6]	✓		✓
6	Brown [7]	✓	✓	✓
7	Lord [8]	✓	✓	✓
8	Shim [9]	✓	✓	
9	Bruns [10]	✓	✓	✓
10	Bhatnagar [11]	✓	✓	✓
11	Jaeger [12]	✓	✓	✓

Dengan demikian artikel dan jurnal yang relevan yang diidentifikasi dari Google Scholar, Science Direct, Informit dan IEEE menggunakan istilah pencarian “social media”, “public sector”, “peranan sosial teknologi di masyarakat”.

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sosial teknologi dan sosial media merupakan tempat berdialog yang tepat terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintah dan masyarakat. Dalam penyajiannya pun harus dengan mudah dimengerti, akurat serta informasi yang diberikan harus tepat waktu.

Sebuah kerangka konseptual hipotesis dibangun berdasarkan literature review [1]. Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini akan meneliti sejauh mana pengaruh sosial teknologi terhadap budaya masyarakat yang telah ada dalam perubahan tantangan keterbukaan. Kerangka pemikiran teoretis dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. *Conceptual Framework.*

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Transparansi, Informasi, dan Masyarakat

Dalam *e-government* kota Palembang belum adanya penerapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan yang dilakukan di dalam pemerintahan. Pada *account* (facebook, instagram dan twitter) pribadi milik walikota Palembang bapak Harnojoyo sering membagikan kegiatan sehari-hari yang sedang dilakukannya, misalnya walikota lagi bergotong royong melakukan pembersihan lingkungan bersama warga setempat dan masih banyak lagi yang dibagikan oleh walikota Palembang.

Transparansi informasi sendiri yang ingin diperankan adalah data informasi yang menjadi konsumsi publik (masyarakat). Negara yang menganut transparansi cenderung menghasilkan informasi lebih lanjut dari pemerintah lain dan lebih mungkin untuk berbagi informasi ini [8]. Namun, upaya mempromosikan keterbukaan dan mengurangi korupsi banyak dibentuk oleh budaya lingkungan suatu bangsa, mulai dari sikap masyarakat terhadap nilai informasi untuk tingkat identifikasi oleh warga dengan pemerintah dan dari kelangsungan hidup pers independen untuk kebijakan informasi diberlakukan oleh pemerintah [13]. Tools (Transparansi, budaya, kunci perubahan) yang tersedia untuk mengukur dampak partisipasi terhadap informasi yang diberikan melalui sosial teknologi dan sosial media. Ditarik kesimpulan bahwa *e-government* kota Palembang belum adanya penerapan transparansi informasi melalui sosial teknologi.

3.2 Sosial Teknologi Informasi dan Transparansi Inisiatif

Pada zaman sekarang Teknologi Informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mempromosikan tata pemerintahan dan mempererat hubungan antara masyarakat dan pihak pemerintahan. Shim & Eom [9] mengatakan bahwa TI dapat menjadi satu kunci perubahan bagi pemerintah dengan mempromosikan tata pemerintahan yang baik, memperkuat prakarsa reformasi berorientasi, mengurangi potensi perilaku korupsi, meningkatkan hubungan antara pegawai pemerintah dan warga, yang memungkinkan untuk pelacakan kegiatan dan aktivitas masyarakat, sertadapat memantau dan mengendalikan perilaku pegawai pemerintahan.

Disamping itu juga, menurut Bhatnagar [11], TI telah berhasil mengurangi korupsi dan menjadikan pemerintah yang meningkatkan akses informasi dalam memastikan semua aturan yang transparan dan diterapkan untuk membangun kemampuan untuk melacak keputusan dan tindakan dari pemerintahan.

Sosial teknologi menunjukkan komitmen sebagai alat efektif untuk mengurangi korupsi, tapi sikap sosial dapat menurunkan efektivitasnya sebagai alat anti-korupsi [14]. Studi kasus [9] menunjukkan bahwa sosial teknologi memegang banyak potensi – dan telah menunjukkan manfaat dalam - anti-korupsi, khususnya oleh meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajerial lebih perilaku korupsi dan dengan mempromosikan akuntabilitas pemerintah dan transparansi.

3.3 Potensi Hambatan Upaya Transparansi

Dalam penerapan transparansi dalam teknologi informasi tidak lepas dari hambatan yang ada seperti budaya. Hambatan ini telah ada dalam masyarakat dan bertambah lebih lanjut sehingga membuat banyak pegawai pemerintahan yang sering ambivalen tentang partisipasi warga langsung dalam proses politik [15].

Meskipun demikian, ada sejumlah faktor yang mendorong TI mempromosikan transparansi dan memerangi korupsi [11], yaitu : 1) Menyediakan informasi tentang peraturan pemerintah dan hak-hak warga negara, 2) Memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah, 3) Mempromosikan pemantauan tindakan pemerintah dan pengeluaran, 4) Menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah, 5) Proses pemerintah pembukaan, seperti catatan tanah, aplikasi untuk lisensi, dan status pembayaran pajak, 6) Mengidentifikasi pejabat terpilih dan pegawai negeri sipil di bawah penyelidikan untuk kegiatan korupsi dan penipuan, dan 7) Penyebaran informasi aset dan investasi dari pejabat terpilih dan sipil.

3.4 Membangun Budaya Transparansi Melalui Sosial Teknologi

Untuk menciptakan budaya transparansi melalui teknologi informasi dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dengan penyajian informasi yang akan diberikan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas yang memiliki budaya yang beraneka ragam.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti kebiasaan, sifat, tradisi dan kebijakan. Sehingga, masyarakat dapat mendukung dalam pengembangan transparansi ini tersendiri dengan cara yang sangat mudah, seperti masyarakat harus melaporkan dengan kata yang mudah dimengerti serta tidak memprovokasi pihak pemerintah dalam penyampaian keluhan yang ada. Contohnya, pada tahun 1999, China menangkap warga untuk tulisan-tulisan mereka yang diposting di *internet* dan pada tahun 2002, pemerintah China menutup 200 dari 2.400 *internet* kafe [16]. Jadi dapat disimpulkan demi tercapainya pemerintahan transparan harusnya memiliki dukungan dari pemerintah dan masyarakat secara baik.

3.5 Sosial Teknologi Merupakan Kunci Perubahan

Agar tercapainya kunci perubahan, ada banyak hal yang harus diperhatikan seperti dalam penggunaan TI. Pertama, akses yang dimiliki pemerintah tidak mempersulit suatu keadaan, masyarakat harus memiliki kepercayaan yang besar dalam menerima informasi, pemberdayaan masyarakat harus seimbang, memiliki nilai sosial yang kuat dan tercapainya pemerintahan yang memiliki birokrasi terarah. Disisi lain, aplikasi Teknologi Informasi, memiliki potensi untuk meningkatkan budaya keterbukaan. Dalam kampanye 2007, Calon Perdana Menteri Australia, Rupert Murdoch menggunakan media cetak dan elektronik yang dimilikinya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat serta melaporkan hasil jajak pendapat mereka sendiri [10]. Akibatnya, *blog* dan jaringan sosial *online* lainnya memainkan besar bagian dengan memberikan pandangan yang berbedasebagai penyeimbang liputan media. Adanya upaya yang gigih oleh blogger dan warga di Australia untuk menetralsir dan menangkal berita industri media [10]. Dapat kesimpulan, teknologi sosial sangat berperan sebagai media penyeimbang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

4 Kesimpulan dan Saran

Dari studi *literature* ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menciptakan pemerintahan yang transparan tidaklah mudah tanpa adanya dukungan yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pemahaman budaya setiap lingkungan maka dengan mudah menciptakan pemerintahan yang transparan sebagai kunci perubahan. Adapun hasil penelitian berupa konsep yang terdiri dari faktor-faktor sosial teknologi *e-government* dan dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya.

References

1. D. Antoni, "Critical Factors of Information Technology Infrastructure Quality for Enhancing Environmental Competencies of The Indonesian Organizations," *Jurnal Ilmiah MATRIK*, vol. 17, pp. 133-150, 2015.

2. K. Hidayat, "Peran Electronic Government dan Relasi Media Massa Lokal dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB (Studi Kasus Pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekertariat Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa : Lombok Post dan Lombok Post dan lombokita.com)," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, 2015.
3. F. Welta, "Perancangan Social Networking sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah," in *Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil (PESAT)*, Bandung, 2013.
4. K. Unsworth and A. Townes, "Transparency, participation, cooperation: a case study evaluating Twitter as a social media interaction tool in the US open government initiative," in *Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research*, 2012, pp. 90-96.
5. I. Mergel, "A framework for interpreting social media interactions in the public sector," *Government Information Quarterly*, vol. 30, pp. 327-334, 2013.
6. D. Kurniasih, "Interaksi Sosial dalam Implementasi E-Government," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 2, 2013.
7. E. Brown and J. Cloke, "Neoliberal reform, governance and corruption in Central America: Exploring the Nicaraguan case," *Political Geography*, vol. 24, pp. 601-630, 2005.
8. K. M. Lord, "The perils and promise of global transparency," *State University of New York Press, New York*, 2006.
9. D. C. Shim and T. H. Eom, "E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data," *Intl Journal of Public Administration*, vol. 31, pp. 298-316, 2008.
10. A. Bruns, "Life beyond the public sphere: Towards a networked model for political deliberation," *Information Polity*, vol. 13, pp. 71-85, 2008.
11. S. Bhatnagar, "E-government and access to information," *Global Corruption Report*, vol. 2003, pp. 24-32, 2003.
12. P. T. Jaeger, *et al.*, "The effects of the Children's Internet Protection Act (CIPA) in public libraries and its implications for research: A statistical, policy, and legal analysis," *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 55, pp. 1131-1139, 2004.
13. E. Brown and J. Cloke, "Neoliberal Reform, Governance and Corruption in the South: Assessing the International Anti-Corruption Crusade," *Antipode*, vol. 36, pp. 272-294, 2004.
14. D. C. Shim and T. H. Eom, "Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital," *International review of administrative sciences*, vol. 75, pp. 99-116, 2009.
15. N. Roberts, "Public deliberation in an age of direct citizen participation," *The American Review of Public Administration*, vol. 34, pp. 315-353, 2004.
16. G. E. Dann and N. Haddow, "Just doing business or doing just business: Google, Microsoft, Yahoo! and the business of censoring China's Internet," *Journal of Business Ethics*, vol. 79, pp. 219-234, 2008.